

**PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI
DAN HUKUM POSITIF**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

ABD.GAFUR MAJID

NIM: 10400112019

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abd. Gafur Majid
NIM : 10400112019
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 15 Agustus 1994
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Pampang I No.20
Judul : Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Hukum
Positif

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata, 15 Agustus 2017
Penyusun,

Abd. Gafur Majid
NIM: 10400112010

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, "Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Hukum Positif", yang disusun oleh Abd. Gafur Majid, NIM: 10400112019, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus M, bertepatan dengan 22 Zulqaidah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 15 Agustus 2017 M
22 Zulqaidah 1438 H

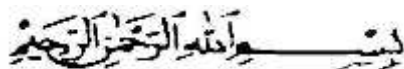
DEWAN PENGUJI

Ketua :	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris :	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	(.....)
Penguji I :	Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag	(.....)
Penguji II :	Abdi Wijaya, S.S, M.Ag	(.....)
Pembimbing I :	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Pembimbing II :	Irfan S. Ag, M. Ag	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Tiada kalimat yang paling pantas penyusun panjatkan selain puji syukur kehadiran Allah swt. atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, Karunia serta izin-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Hukum Positif” sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Rampungnya skripsi ini, penyusun mempersembahkan untuk OrangTua tercinta ayahanda Abd.majiddan Ibunda tercinta Hasnah yang tak pernah bosan dan tetap sabar mendidik, membesarkan, memberi dukungan, memberi semangat serta senantiasa mendoakan penyusun, “*You’re the Best motivator*”. Terima kasih kepadasaudara sayaMuh.Anugrah, Nitra dan Suami dari kakak saya Kamri Akib., yang selalu bersedia ketika penyusun meminta bantuan.*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

1. Teruntuk Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar,
2. Teruntuk Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag, selaku Wakil Dekan

bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Hamsir, SH., M. Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. H. M. Saleh Ridwan, M. Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Segenap Pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Teruntuk Bapak Dr. Abdillah Mustari, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak Dr. Achmad Musyahid Idrus, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, Nasehat, motivasi demi kemajuan penyusun.
4. Teruntuk Bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan, M. Ag dan Irfan, S. Ag, M. Ag selaku pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan penyusun.
5. Teruntuk Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu, membimbing penyusun dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penyusun dalam penulisan skripsi ini dan semoga penyusun dapat amalkan dalam kehidupan di masa depan.
6. Kepada keluarga Ir. Yamin, Ir. Karyawati, Fajar, Ahmad Muflih, Lisa, Arya. Dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih telah memberikan dukungan kepada penyusun.
7. Kepada karyawan dan karyawan big taksi Faisal, Guntur, Muh. Irwan, Perkasa Panji, Asmaul, Nurul. Dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih telah memberikan bantuan kepada penyusun.

8. Sahabat-sahabat Alumni SMA Neg. 1 Mattiro sompe, dan Alumni PPM RAHMATUL ASRI, Dan para sahabat Kerukunan Mahasiswa Pinrang (KMP), Terima kasih atas segala pengertian, Dukungan, Kebersamaan dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum terkhusus Angkatan 2012 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar : Dwi Yunita, A. Zaqiah Saudi, Suriati Andayani, Sunarti, Ismawati, Nur Syamsi Asis, AgusPutri Al Mukarrama, Maemuna, Rahmawati, Mien Trisasmita, Hamsir, Ahmad Syarif, Muh. Rezki, Muh Ridwan, Ulil Amri Syah, Fikran AdiJaya, Syahrin, Irsan. Dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah menambah pengalaman dan cerita dalam hidup dan akan selalu menjadi kenangan.
10. Terima Kasih kepada Zulfikar, Zulkifli, Syahrul Budiman Syam, Wahyu, A.Aswad, A. Muh. Nur, Murdiono, Hasni, Asmar, Ikbali, Fitriah, bahar, Inna Sintia, Akbar Subandi, Caca, Idrus, Fajar Arifin, Syaiful, Safwan, Anugrah, Revi, Nurhamdayani, Egidya, Ainun rafika. Dan Semua teman-teman Mahasiswa Labolong yang selalu mendoakan, menghibur dan memberikan support dikala penulis lelah dalam menyusun skripsi.
11. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penyusun dalam penyusunan penulisan skripsi ini baik secara materil maupun formil.

Penyusun menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada

dalam penulisan hukum ini.Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi
siapapun yang membacanya.*Amin Yaa Rabbal Alamin.*



Samata,15 Agustus 2017

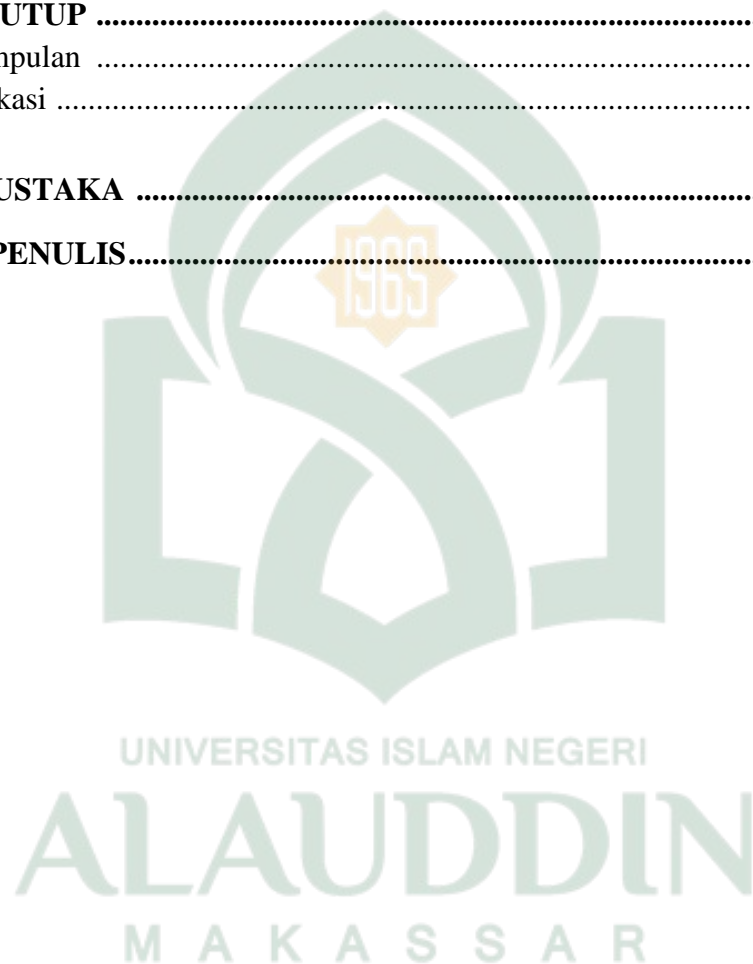
Penyusun,

Abd. Gafur Majid
NIM: 10400112019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PRANIKAH	16
A. Pengertian Perjanjian Pranikah	16
B. Ruang Lingkup Perjanjian Pranikah	24
C. Tujuan Perjanjian Pranikah	28
BAB III FAKTOR-FAKTOR PERJANJIAN PRANIKAH	33
A. Sebab Terjadinya Perjanjian Pranikah	33
B. Proses Penerapan Perjanjian Pranikah	34
C. Implikasi Perjanjian Pranikah	35
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PERJANJIAN PRANIKAH	40
A. Perjanjian Pranikah Perspektif Mazhab Hanafi	40
1. Latar Belakang Mazhab Hanafi	43
2. Rukun Perkawinan Mazhab Hanafi	43

3. Syarat Perkawinan Mazhab Hanafi	44
B. Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Positif	47
1. Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	47
2. Pasal 139-154 KUHPerdara	56
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	61
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi	64
DAFTAR PUSTAKA	66
BIODATA PENULIS	68



TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal		zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik dibawah)
ض	ad		de (dengan titik dibawah)
ط	a		te (dengan titik dibawah)
ظ	a		zet (dengan titik dibawah)

ع	‘ain		apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
	ha	H	Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	fat ah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	ammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fat ah dan y	ai	a dan i
وَ	fat ah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ... / اَ....	Fat ah dan alif atau y		a dan garis di atas
يِ	kasrah dan y		i dan garis di atas
وِ	ammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

: m ta

: ram

قيل : q la

يموت : yam tu

4. *T marb ah*

Transliterasi untuk *t ' marb ah* ada dua yaitu: *t ' marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: rau ah al-a f l

المدينة الفا ضلة : al-mad nah al-f ilah

: rau ah al-a f l

5. *Syaddah (Tasyd d)*

Syaddah atau tasyd d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyd d, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

: rabban

نجينا : najjain

: al- aqq

: nu ima

: 'duwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi .

Contoh:

: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: ‘Arab (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalزال (az-zalزال)

: al-falsafah

: al- bil du

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

: ta’mur na

: al-nau’

: syai’un

: umirtu

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur' n), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

F il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. *Laf al-jal lah ()*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mu ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله d null h bill h

Adapun *t' marb* ah di akhir kata yang disandarkan kepada laf al-jal lah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

في رحمة اللهم hum f ra matill h

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l
Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi bakkata mub rakan
Syahru Rama n al-la unzila fih al-Qur' n
Na r al-D n al- s
Ab Na r al-Far b
Al-Gaz l
Al-Munqi min al- al l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Ab al-Wal d Mu ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-Wal d Mu ammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal d Mu ammad Ibnu)

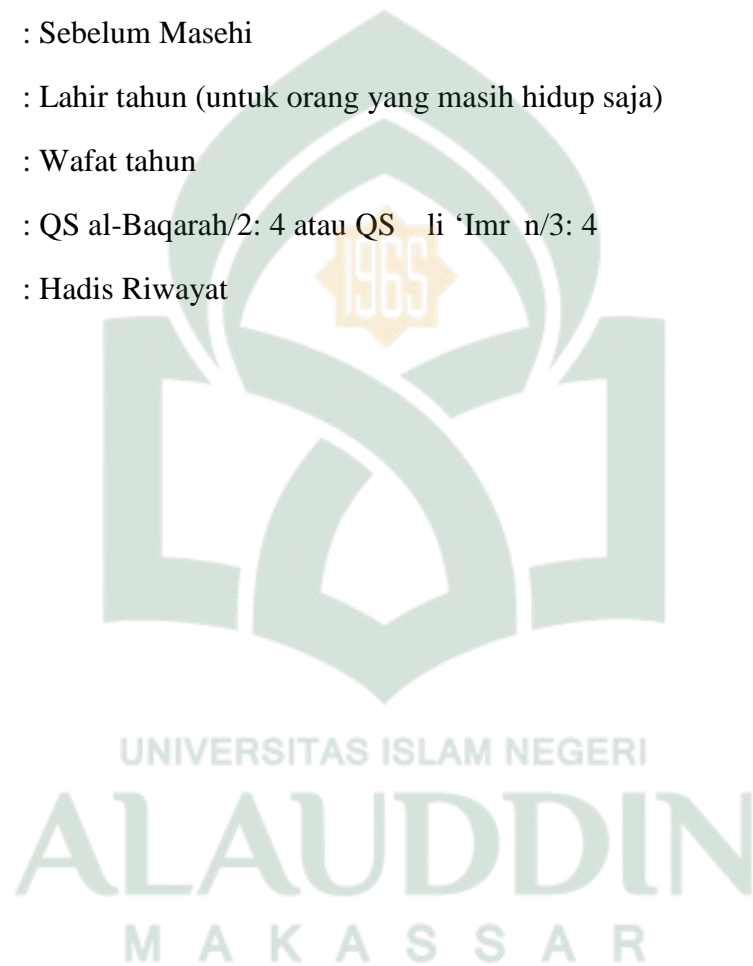
Na r mid Ab Za d, ditulis menjadi: Ab Za d, Na r mid (bukan: Za d, Na r mid Ab)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. : sub nah wa ta' l

saw.	: allall hu ‘alaihi wa sallam
a.s.	: ‘alaihi al-sal m
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	: Wafat tahun
QS.../...: 4	: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS li ‘Imr n/3: 4
HR	: Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama Penulis : ABD. GAFUR MAJID
Nim : 10400112019
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Perjanjian Pranikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif.

Skripsi ini membahas perjanjian pranikah perspektif Mazhab Hanafi dan Hukum Positif yang berdasar pada Pasal 139-154 KUHPdata dan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana hakekat dan urgensi perjanjian perkawinan? (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penerapan perjanjian pra-nikah dan implikasinya? (3) Bagaimana rukun dan syarat perkawinan dalam Mazhab Hanafi?

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode *library research*..

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Masih banyak terdapat kekuarangan, selain pengaturan perjanjian kawin dalam Undang- Undang Perkawinan tidak selengkap KUH Perdata terdapat juga kekurangan lain, khususnya pasal yang mengatur tentang Perjanjian kawin. Dan hal lain juga bahwa Undang-Undang Perkawinan masih menghidupkan dualisme hukum. (2) Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. (3) Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu

Implikasi dari penelitian ini adalah Pemerintah dalam hal ini ialah kiranya dapat memperhatikan perihal tentang pengaturan Perjanjian Perkawinan karena masih terdapat cela yang bisa merugikan para pihak. Serta perlu adanya kesadaran masyarakat agar tidak memandang negatif mengenai Perjanjian Pra Nikah tersebut melainkan kiranya masyarakat dapat memahami secara jelas tentang pentingnya Perjanjian Pra Nikah pada pernikahan untuk melindungi para pihak yang berkepentingan dalam perkawinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika seseorang telah mencapai usia cukup matang dan dewasa untuk melangsungkan pernikahan, kemudian juga telah didukung oleh berbagai faktor seperti memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup untuk menghidupi sebuah keluarga setiap bulannya. Memutuskan untuk mengubah status menjadi suami dan istri yang sah bukanlah perkara mudah. Banyak hal yang perlu dipersiapkan seperti jasmani dan rohani, serta kondisi finansial dan pasangan. Banyak pasangan merasa tidak siap dengan pergantian status mereka dan tanggung jawab yang akan dipikul di balik status mereka yang berubah. Kemudian tuntutan bertambah dari pihak keluarga karena menginginkan hadirnya buah hati. Belum lagi berpikir kebutuhan jangka panjang baik itu kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga yang akan di bangun.

Pada hakekatnya perjanjian pra-nikah adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Perjanjian ini mengikat kedua calon mempelai dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak sehingga bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Perjanjian ini terkesan sebagai perjanjian yang seolah-olah mendoakan

terjadinya perpisahan antara pasangan calon mempelai. Namun, tidak ada orang yang bisa memastikan 100% tentang apa yang akan terjadi dan menimpa orang



lain. Sehingga meski berkesan tidak mendukung kukuhnya bahtera rumah tangga yang dibangun seseorang, perjanjian ini sama-sama melindungi harta pribadi baik dari pihak suami atau istri nantinya bila terjadi perceraian atau kematian. Allah SWT berfirman didalam QS. An-nisa/4: 20- 21 sebagai berikut:

مَا آتَاخُذُونَهُ شَيْئًا مِنْهُ تَأْخُذُوا فَلَا قَنْطَارًا إِلَّا حَدِّثْهُمْ وَأَتَيْتُمْ زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ أَسْتَبَدَّ أَلْأَرْذَلُ ثُمَّ وَإِنْ
لَمِظًا مِمَّنْكُمْ وَأَخَذَ بَعْضُ إِلَى بَعْضِكُمْ أَفْضَى وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ ۖ مُبِينًا وَإِثْمًا بُهْتًا

غَا¹

Terjemahnya :

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Kebenaran perjanjian pra-nikah di Indonesia sendiri dilindungi secara hukum, yakni pada Pasal 29 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, Agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

¹Departemen Agama R.I, *Al-Quran terjemahnya* (Jakarta: C.V Toha Putra, 2008), h. 119.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”²

Penjelasan pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Namun Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan suatu peraturan yang bertentangan. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

1. “Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam.
2. Perjanjian berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.”³

Isi pasal 11 tersebut, dirinci oleh Pasal 45 sampai Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian perkawinan yang dijelaskan oleh Pasal 29 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa taklik talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan dalam kompilasi hukum Islam.⁴

² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab V, Pasal 29.

³ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban-kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Pasal 11.

⁴ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. IV , Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 41-44.

Ini artinya hukum telah mengakui adanya perjanjian pra-nikah yang melindungi antar pasangan suami dan istri. Ketentuan tentang perjanjian perkawinan dalam pasal 29 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 139-154 KUHPerdata. Masih berlakunya pasal-pasal dalam KUHPerdata tersebut karena peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perjanjian kawin. Untuk itu melalui petunjuk Mahkamah Agung RI No.MA/0807/75 membolehkan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.⁵ Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.⁶ Sedangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁷

Pentingnya perjanjian perkawinan dapat dilakukan apabila pengaturan harta benda tidak sesuai dengan keinginan calon suami istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

⁵ Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia* (Cet. 1; Makassar: Alauddin press, 2011), h. 100.

⁶W.j.s. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Cet. 1; Jakarta:PT.Balai Pustaka (Persero)), h.470.

⁷Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, (Cet. 1; Alauddin University Press, 2014), h. 122-123.

1. “Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi bercampur.
2. Harta bawaan, hadiah atau warisan menjadi harta masing-masing selama tidak diperjanjikan sebelumnya.”⁸

Berdasarkan ketentuan diatas, perjanjian biasa dibuat asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan serta harus dibuat tertulis (akta notaris) dengan tujuan:

1. Keabsahan perjanjian kawin tentang harta benda.
2. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perkawinan itu seumur hidup.
3. Demi kepastian hukum.
4. Sebagai alat bukti yang sah.
5. Mencegah adanya penyelundupan hukum.⁹

Bertolak dari uraian perjanjian pranikah tersebut di atas, penyusun skripsi berkeinginan untuk menelaah perjanjian pranikah, khususnya mengenai perjanjian pranikah menurut Mazhab Hanafi dan hukum positif ke dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “ Hukum Perjanjian Pranikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Hukum Positif”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan ini, yaitu: Bagaimana hukum

⁸Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab V, Pasal 35.

⁹Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia*, h. 100- 102.

perjanjianpranikah perspektif mazhab hanafi dan hukum positif? Pembahasan selanjutnya akan dirumuskan dalam beberapa sub masalah, adapun sub masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakekat dan urgensi perjanjian pranikah?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penerapan perjanjian pra-nikah dan implikasinya?
3. Bagaimana tinjauan Mazhab Hanafi dan Hukum Positif terhadap perjanjian pranikah?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Adapun judul penelitian ini adalah Hukum Perjanjian Pranikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Hukum Positif. Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud, maka dijelaskan beberapa variabel sebagai berikut.

Adapun yang dimaksud dengan hukum ialah peraturan atau adat resmi yang dibuat oleh penguasa.

Perjanjian berasal dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst* dan *verbinten*. Dalam KUHPerdara digunakan dengan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.

Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰

Pranikah terdiri atas dua kata yaitu pra dan nikah, pra adalah sebelum sedangkan nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan

¹⁰R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Edisi 1 (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3.

ketentuan hukum dan ajaran agama.¹¹ Jadi pranikah adalah sebelum melakukan ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama untuk melakukan sebuah perjanjian.

Perspektif berasal dari kata Itali “*prospettiva*” yang berarti gambar pandangan. Sedangkan menurut istilah perspektif adalah sudut pandang atau pandangan seorang terkait dengan suatu hal atau masalah tertentu atau hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya).

Dalam kamus hukum dijelaskan, bahwa Hukum Islam ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Islam adalah bagian dari ilmu fikih. Karena ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis Hukum Islam dalam mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan dan masyarakat secara umum.¹²

Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab fikih dalam Islam sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifa yang bernama lengkap Abu Hanifa bin Nu'man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi dan terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide modern.

Hukum positif adalah “kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. 1; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 962.

¹² Supardin, *Materi Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 23.

Negara Indonesia.” Penekanan “pada saat ini sedang berlaku,” karena secara keilmuan *rechtswefenschap*, pengertian hukum positif diperluas. Bukan saja yang sedang berlaku sekarang, melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa lalu. Perluasan ini timbul karena dalam definisi keilmuan mengenai hukum positif dimasukkan unsur “berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu.” Hukum yang pernah berlaku adalah juga hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu, sehingga termasuk pengertian hukum positif, walaupun dimasa lalu.¹³

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu perjanjian pranikah dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perjanjian pranikah perspektif mazhab hanafi.

Dengan demikian, dari definisi operasional variabel dan ruang lingkup penelitian diatas maka yang dimaksud dengan perjanjian pranikah ditinjau berdasarkan pasal 29 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan mazhab hanafi adalah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Serta

¹³Oscar Moch, [http://unpashukum.blogspot.co.id/\(09 juni 2016\).](http://unpashukum.blogspot.co.id/(09%20juni%202016).)

yang disebutkan dalam kompilasi hukum Islam lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampur adukkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal.

D. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan hasil penelitian yang serupa dengan pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini, artinya masalah ini belum pernah diteliti sebelumnya.

1. R. Soeroso dalam bukunya *Perjanjian Di bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, buku ini menjelaskan teori- teori hukum perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; cara penyusunan perjanjian di bawah tangan dan contoh macam- macam perjanjian yang disertai dengan anatominya.¹⁴
2. Zainuddin Ali dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, buku ini membahas tentang persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat hukumnya.¹⁵
3. Istiqamah dalam bukunya *Hukum Perdata di Indonesia*, buku ini membahas tentang perjanjian perkawinan dan ruang lingkup hukum perdata.¹⁶

¹⁴R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, h. 3.

¹⁵Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 41.

¹⁶Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia*, h. 101-102.

4. Andi Intan Cahyani dalam bukunya *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, buku ini membahas tentang perjanjian perkawinan yang dimuat dalam kompilasi hukum Islam (KHI) serta pencegahan dan pembatalan perkawinan.¹⁷

E. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi nanti maka peneliti akan menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku Perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah mendeskripsikan dan melukiskan realita sosial yang kompleks atau menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.¹⁸

Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya

¹⁷ Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, h. 129-130.

¹⁸ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 40.

dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan baru.

Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang perjanjian pranikah perspektif mazhab hanafi dan hukum Islam dengan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan dan lainnya.

2. Metode pendekatan

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian tentang perjanjian pranikah perspektif mazhab hanafi dan hukum Positif. Maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan yuridis

Pendekatan yuridis yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan beberapa data yang memuat tinjauan hukum, terutama dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Pendekatan syari'i

Pendekatan ini adalah pendekatan hukum (*syari'i*), yakni menjelaskan hukum yang berhubungan dengan hukum Islam serta pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan

bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

a. Sumber primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Misalnya buku Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 139-154 KUHPerduta. Masih berlakunya pasal-pasal dalam KUHPerduta tersebut Karena Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perjanjian kawin. Untuk itu melalui petunjuk Mahkamah Agung RI No.MA/0807/75 membolehkan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerduta.

b. Sumber sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen atau data yang dikumpulkan oleh orang lain.¹⁹

4. Metode pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data nanti teknik yang akan digunakan yaitu:

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), h. 93.

- a. Kutipan langsung, yaitu peneliti mengutip pendapat atau tulisan orang secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa berubah. Misalnya, dalam Undang-undang ketentuan tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 139-154 KUHPerdara. Masih berlakunya pasal-pasal dalam KUHPerdara tersebut karena peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perjanjian kawin. Untuk itu melalui petunjuk Mahkamah Agung RI No. MA/0807/75 membolehkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata).
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru. Misalnya, hukum perjanjian pranikah perspektif mazhab hanafi dan hukum positif.

5. Metode pengolahan data dan analisis

Metode pengolahan data nanti teknik yang akan digunakan yaitu:

- a. Metode komparatif yaitu, digunakan untuk membandingkan beberapa data dan memberikan gambaran secara jelas, sistematis, objektif serta kritis yang dijelaskan antara mazhab hanafi dan hukum positif mengenai fakta-fakta tentang permasalahan yang dibahas.

- b. Metode induktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum. Misalnya, untuk hukuman pelaku zina hendaknya dilakukan dihadapan masyarakat agar dijadikan contoh bagi mereka dan bagi terhukum akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Hukuman yang patut dikenakan bagi pelaku zina yang dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan secara bertele-tele atau menaruh rasa belas kasihan kepada pelakunya. Sebab sikap seperti itu akan menghambat pelaksanaan hukuman Allah.
- c. Metode deduktif yaitu digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan.²⁰ Misalnya, salah satu pengaruh positif dari perjanjian pranikah dapat digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan dan kemudahan memperoleh informasi, dan pengaruh negatif dari perjanjian pranikah.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1. Adapun tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui hakekat dan urgensi perjanjian pranikah.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penerapan perjanjian pranikah dan implikasinya.

²⁰Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, h. 144.

- c. Untuk mengetahui pandangan mazhab hanafi dan hukum positif terhadap perjanjian pranikah
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Kegunaan Teoritis, Secara teoritis penulisan proposal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum Islam dan hukum positif mengenai perjanjian pranikah.
 - b. Kegunaan Praktis
 - 1) Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang hukum perjanjian pranikah perspektif mazhab hanafi dan hukum positif.
 - 2) Dapat mengetahui implikasi perjanjian pranikah.
 - 3) Dapat mengetahui pandangan mazhab hanafi dan hukum positif.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PRANIKAH

A. Pengertian Perjanjian Pranikah

Secara etimologi perjanjian disebutkan sebagai perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, persetujuan antara dua pihak syarat, ketentuan, tangguh, penundaan batas waktu.²¹

Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lenih lainnya.”²²

Dari rumusan pasal ini mencakup perjanjian dalam artian yang luas, tidak hanya perjanjian yang bersifat kebendaan namun juga perjanjian yang bersifat personal seperti perjanjian perkawinan.

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian menurut pendapat Sayyid Sabiq adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syari’ah yang disepakati adanya

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang melawan hukum Syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, h. 350.

²² Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, buku III, bab II, pasal 1313.

menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain, apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum Syariah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut. Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi dari perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan dari perjanjian itu.²³

²³Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 2-3.

Suatu perjanjian haruslah memenuhi beberapa unsur agar perjanjian tersebut dapat dipandang sah menurut Hukum Islam:

1. Ijab kabul (*shigat* Perikatan)

Ijab kabul dalam sebuah perikatan dapat dilaksanakan dengan ucapan secara lisan atau tulisan. Menurut Wabbah Zuhaili, setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yakni: pertama, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis perikatan atau perjanjian yang dikehendaki, kedua, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, ketiga, yaitu tidak adanya keraguan antara ijab dan qabul, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak sedang dalam keadaan terpaksa.

2. Objek Perikatan Para ahli Hukum Islam sepakat bersuara bahwa objek perikatan adalah harus memenuhi empat syarat, yakni: pertama, objek perikatan harus sudah ada secara nyata dan kongkret atau diperkirakan akan ada pada masa mendatang, kedua, dibenarkan oleh syara", ketiga, perikatan harus dapat diserahkan ketika terjadi perikatan, dan keempat, perikatan harus jelas atau dapat ditentukan dan harus diketahui kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian atau perikatan tersebut.

3. Subjek Perikatan Pihak-pihak yang melakukan dan terlibat di dalam sebuah perikatan atau perjanjian disebut dengan subjek perikatan. Dapat diketahui bahwa untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan yang dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka perikatan tersebut harus dibuat oleh orang-orang yang telah cakap hukum,

memenuhi syarat syarat cakap hukum, dan memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut.²⁴

Perjanjian berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat (1):

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا²⁵

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Ayat ini memerintahkan manusia untuk memenuhi aqad atau perjanjian yang mereka lakukan. Aqad atau perjanjian dalam hal mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat manusia dengan manusia lainnya dalam pergaulan sesamanya.

Dengan diadakannya suatu perjanjian maka pihak yang melakukan perjanjian menerima segala akibat hukum yang timbul yakni adanya ikatan yang sangat erat antar pihak. Ikatan yang dimaksud adalah timbulnya hak dan kewajiban baik secara sepihak maupun secara timbal balik sehingga calon suami dan isteri yang melakukan perjanjian pranikah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perjanjian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra ayat (34) bahwa:

²⁴ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Lampung, Sinar Sakti: 2015), h.82; dikutip dalam Alya Nurhafidzah, “Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), h. 11.

²⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 141.

﴿مَسْئُولًا كَأَنَّ الْعَهْدَ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُواْ شُدَّهُ رَيْبُكَ حَتَّىٰ أَحْسَنُ هِيَ بِأَلَّتِي إِلَّا الْيَتِيمَ مَالٍ تَقْرَبُواْ وَلَا

26

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami isteri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri atau berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.

Perjanjian pra nikah sering juga disebut dengan perjanjian perkawinan. Jika diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk pada dua akar kata, perjanjian dan pernikahan. Dalam bahasa Arab, *janji* atau *perjanjian* biasa disebut dengan *atau*, yang dapat diartikan dengan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.²⁷

²⁶Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h.

²⁷M. Yusrizal, blogspot.co.id/2011/11/aspek-hukum-perjanjian-pra-nikah.html, (01 November 2016).

Biasanya perjanjian pra nikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri. Memang pada awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih oleh kalangan atas yang memiliki warisan besar. Namun seiring dengan perkembangan zaman meningkat pula kesadaran hukum masyarakat, sehingga pada zaman sekarang tidak sedikit pasangan calon suami isteri yang membuat perjanjian pranikah dari berbagai kalangan.

Perjanjian perkawinan (*huwelijksche voorwaarden*) yang terbaru (modern) sekarang berasal dari kontrak-kontrak perkawinan yang lama, maka tidaklah mengherankan ketika zaman Belanda perjanjian perkawinan (*huwelijksche voorwaarden*) itu masih sering tidak terbatas hanya kepada ketentuan mengenai kekayaan. Perjanjian perkawinan juga sering ditentukan hal-hal yang lain sifatnya, misalnya hak-hak dan kewajiban suami isteri, janji-janji dimana mereka akan bertempat tinggal, ketentuan tentang perwalian anak jika mereka pisah, dan sebagainya.²⁸

Perjanjian pra nikah adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan di hadapan notaris. Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai perjanjian pra nikah menyebutkan:

1. “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

²⁸ “Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya”, *Tesis* (Sumatera utara: Universitas Sumatera Utara), h. 9.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”²⁹

Ketentuan tentang perjanjian perkawinan terdapat pasal 29 UU No.1 1974 dan pasal 139-154 KUHPerdota. Masih berlakunya pasal dalam KUHPerdota tersebut karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perjanjian kawin untuk itu melalui petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/0807/75 membolehkan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdota.

Adapun pengertian perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.³⁰

Perjanjian kawin dapat dilakukan apabila pengaturan harta benda tidak sesuai dengan keinginan calon suami istri sebagai mana diatur dalam Pasal 35 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. “Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi bercampur
2. Harta bawaan, hadiah atau warisan menjadi harta masing- masing selama tidak diperjanjikan sebelumnya.”³¹

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab V, Pasal 29.

³⁰ Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia*, h. 100.

³¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab VII, Pasal 35.

Dengan demikian apabila calon suami istri ingin menyimpan dari ketentuan tersebut diatas, maka perjanjian perkawinan dapat dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama, dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Peranjian tersebut tdiak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan keasusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”³²

Berdasarkan ketentuan diatas, perjanjian bisa dibuat asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan serta harus dibuat tertulis (akta notaris) dengan tujuan:

1. Keabsahan perjanjian kawin tentang harta benda;
2. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perkawinan itu seumur hidup;
3. Demi kepastian hukum;
4. Sebagai alat bukti yang sah;
5. Mencegah adanya penyelundupan hukum.

Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan :

1. bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak lainnya;

³²Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab V, Pasal 29.

2. kedua belah pihak masing- masing mempunyai usaha sendiri- sendiri, sehingga jika salah satu jatuh bangkrut (pailit), yang lain tidak tersangkut ;
3. masing- masing bertanggung jawab atas utang-utang yang mereka buat sebelum kawin.

B. Ruang Lingkup Perjanjian Pranikah

Pada era globalisasi saat ini masyarakat Indonesia memerlukan akan adanya kepastian hukum tentang Perjanjian Pra Nikah khususnya pihak calon suami dan calon istri untuk melindungi setiap hak dari masing-masing pihak. Akan tetapi pada dewasa ini kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa Perjanjian Pra Nikah merupakan suatu hal yang tabuh atau tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan terdiri atas 14 Bab yang meliputi 67 pasal.³³ Tentang Perjanjian Pra Nikah/Perjanjian kawin diatur dalam pasal 29 ayat 1-4 yang pengertiannya adalah: ayat 1 yang berarti, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana

³³ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.ke.7, (Jakarta: Penerbit PT Ghalia Indonesia),hal.4-5

isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.³⁴ Penerapan peraturan tentang Perjanjian Pra Nikah atau perjanjian kawin belum begitu nampak di Indonesia karena masyarakat Indonesia masih menganggap Perjanjian Pra Nikah masih sangat tabu. Di negara barat, tentang Perjanjian Pra Nikah dianggap sudah biasa.

Yang melatarbelakangi dibuatnya Perjanjian Pra Nikah ini ialah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat. Sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya Perjanjian Perkawinan ialah jika diantara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau si pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadikan kepada salah seorang suami istri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk pada hukum berbeda seperti yang terjadi pada perkawinan campuran. Dengan diadakannya Perjanjian Perkawinan/ Perjanjian Pra Nikah maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.³⁵

³⁴Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab V, Pasal 29 ayat (1).

³⁵H.A Damanhuri H.R, *Segi-segi hukum Perjanjian Perkawinan harta bersama*, cet.ke.II(Palembang: CV.Mandar Maju, 2012), h. 13-14.

Perjanjian perkawinan berdasarkan al-Qur'an dalam QS An-Nisa ayat 21 sebagai berikut:

﴿غَلِيظًا مِّثْقًا مِنْكُمْ وَأَخَذَ بَعْضُ إِلَى بَعْضٍكُمْ أَفْضَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ، وَكَيْفَ³⁶

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Perkawinan adalah hubungan antara wanita dengan pria yang diikat secara agama melalui suatu lembaga resmi yang sah. Hal ini dikuatkan dalam QS An-Nisa ayat 21 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang *miitsaghan ghaliizhan* yang berarti suatu perjanjian perkawinan yang kuat dan kokoh.³⁷

Pada dasarnya perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, yaitu harta calon suami ataupun harta calon istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 2 (dua) macam harta benda dalam perkawinan, yaitu:

1. Harta bersama

Yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Asal darimana harta ini diperoleh tidak dipersoalkan.

³⁶Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h.

³⁷Mohd. Idris Ramulyo, SH, MH, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999, h.6; dikutip Dalam Alya Nurhafidzah, “Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), h. 18.

Apakah harta itu didapat dari isteri atau suami, semuanya merupakan harta milik bersama suami-isteri.

2. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami isteri kedalam perkawinannya, harta benda yang diperoleh masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan.

Meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan kepada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat surat perjanjian perkawinan isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Adapun Manfaat dari perjanjian pranikah adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta *gono gini*. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta *gono gini*.
2. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.

3. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian,
4. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.³⁸

C. Tujuan Perjanjian Pranikah

Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan modern telah mempengaruhi cara berpikir manusia menjadi kritis sehingga perkawinan yang sakral dan suci dapat ternoda dengan adanya suatu perjanjian perkawinan.³⁹ Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

³⁸Mike Rini, "Perlukah Perjanjian Pra-nikah?", *Danareksa online*, 2 Maret 2005, (http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=), diakses pada 12 Januari 2006, dikutip Dalam Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita", *Jurnal* (Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2008).

³⁹maksudnya makna dari perkawinan itu sendiri telah dikesampingkan, dimana perkawinan itu untuk menyatukan, namun dengan adanya perjanjian perkawinan telah ada niat untuk tidak menyatukan terutama masalah harta, walaupun perjanjian perkawinan itu sendiri di perbolehkan dan tidak ada peraturan manapun yang melarang tentang perjanjian perkawinan.

Perjanjian kawin atau pernikahan menurut Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Jadi, perjanjian kawin dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, artinya adanya harta diluar persatuan.

Dalam hal mereka kawin dengan persatuan harta secara bulat, maka yang diperjanjikan adalah pengelolaannya. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal/calon suami/istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perjanjian mereka.⁴⁰ Dengan demikian, perjanjian kawin perlu kalau calon suami istri pada saat akan menikah memang telah mempunyai harta atau selama perkawinan di harapkan didapatnya harta. Perjanjian kawin di Indonesia tidak begitu populer, karena mengadakan suatu perjanjian mengenai harta antara calon suami dan isteri, mungkin dirasakan banyak orang merupakan hal yang tidak pantas, bahkan dapat menyinggung perasaan. Lembaga hukum perjanjian kawin, pada dasarnya adalah lembaga dari hukum perdata barat. Namun pada saat ini, lembaga tersebut semakin diterima oleh kita sejalan dengan kemajuan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, serta paham induvidualisme yang mulai merasut dalam kehidupan kita. Lembaga tersebut akhirnya merupakan suatu kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia.

⁴⁰ Komar Andasasmita, *Hukum Harta Perkawinan Dan Waris, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek)*, Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987, h. 53.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat, yaitu :

1. “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”⁴¹

Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, yang dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :

1. Syarat Subyektif,⁴² yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan subyek perjanjian, terdiri dari :
 - a. Kesepakatan.
 - b. Kecakapan.
2. Syarat Obyektif,⁴³ yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan obyek perjanjian, terdiri dari :
 - a. Hal tertentu.
 - b. Sebab yang halal.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, hal ini diatur pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1

Tahun 1974.⁴⁴ Biasanya perjanjian dibuat untuk kepentingan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun isteri, meskipun undang-

⁴¹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1320.

⁴² Suatu perjanjian yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat subyektif dapat dimintakan pembatalannya. Dengan kata lain perjanjian ini semula sudah dilaksanakan atau berlaku bagi para pihak, tetapi karena tidak terpenuhinya syarat subyektifnya, yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan dari para pihak, atas permintaan dari pihak yang meminta pembatalan dapat dinyatakan batal oleh hakim, jika tidak perjanjian tersebut selamanya sah dan berlaku.

⁴³ Suatu perjanjian adalah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat obyektif dari perjanjian sehingga dari semula sudah batal.

undang tidak mengaturnya secara jelas, segalanya diserahkan kepada para pihak. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Allah swt. Berfirman di dalam Q.S. Al-Maidah/5:1.

بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ مَنْوَالَّذِينَ يَتَأَيَّهَا⁴⁵

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman penuhilah perjanjian yang kamu perbuat,...”

Yang berarti bahwa segala janji yang telah diperbuat dan yang telah diikat antara manusia demi kepentingan pergaulan sesama manusia mestilah dipenuhi.

Jika ada perjanjian yang dibuat antara manusia dengan manusia, antara suami dan isteri, perjanjian itu adalah sah. Siapapun yang membuat perikatan berdasarkan perjanjian berarti mempunyai perjanjian berdasarkan syariat Islam.”⁴⁶

Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 tersebut diatas adalah suatu dasar untuk membuat perjanjian perkawinan untuk golongan penduduk yang menganut agama Islam, karena ayat tersebut tidak membatasi bentuk perjanjian. Oleh sebab itu

⁴⁴Pasal 29 UUPK menyebutkan bahwa : a) Pada waktu atau selum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ke tiga tersangkut. b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan c) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan d) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ke tiga.

⁴⁵Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 141.

⁴⁶T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: CV. Percetakan Mestika, 1977), h.173.

terdapatlah satu perjanjian tentang perjanjian perkawinan, cuma cara dan bentuk perjanjian perkawinan tersebut tidak secara tegas di jelaskan dalam kitab Al-Qur'an dan Hadist juga belum dapat penjelasan tentang perjanjian perkawinan tersebut.

Apabila perjanjian perkawinan ditinjau dalam UU No. 1 Tahun 1974, bahwa perjanjian perkawinan bertujuan untuk penegasan tentang pengaturan dan permasalahan harta perkawinan antara suami isteri. Perjanjian perkawinan dibuat dengan tertulis, dibuat atas kesepakatan para pihak (suami isteri) dihadapan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sewaktu proses penandatanganan.

Dalam Hukum Islam, perjanjian semacam ini sudah tertera di halaman akhir buku nikah, yang disebut *sighat ta'liq* dan dibacakan suami. "Perjanjian perkawinan baru sah apabila dilakukannya sesudah perjanjian. Sebab itulah *taklik talak*, yang juga termasuk dalam perjanjian, dilaksanakan sesudah perkawinan dilangsungkan."⁴⁷

Perjanjian pernikahan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

⁴⁷ T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam* h. 112.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PERJANJIAN PRANIKAH

A. Sebab Terjadinya Perjanjian Pranikah

Salah satu alasan kenapa perjanjian pranikah penting bagi wanita asal Indonesia yang menikah dengan seorang pria WNA ialah dibuat karena sampai saat ini Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 masih belum memihak wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing. Dalam Undang-Undang itu disebutkan wanita Indonesia harus melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya dalam jangka waktu satu Tahun setelah menikah dengan WNA (Warga Negara Asing). Dalam Undang-Undang tersebut juga dikatakan, WNI bisa tetap mendapat hak kepemilikan atas tanah jika memiliki perjanjian nikah.

Dengan kata lain bahwa jika tidak dibuat suatu Perjanjian Pra Nikah, maka salah satu pihak yang berasal dari Indonesia (WNI) tidak dapat memiliki hak atas tanah selama kurang dari satu tahun. Tapi sebaliknya jika dibuat suatu Perjanjian Pra Nikah, maka aset bisa dimiliki oleh istri atau siapapun yang WNI-nya dan juga Hak warisnya juga mengikuti hukum Indonesia. Suatu alasan yang sangat penting sehingga perlu diadakannya Perjanjian Pra Nikah bagi para pihak yang akan menikah, ialah jika salah satu pihak (suami/ istri) sebelumnya pernah menikah, maka Perjanjian Pra Nikah ini sangatlah penting karena jika tidak dibuat perjanjian ini maka mempelai kedua tersebut akan memiliki/ memperoleh sebagian dari seluruh harta peninggalannya. Alasan dibuatnya Perjanjian Pra Nikah bukanlah semata-mata untuk bercerai dikemudian hari, tapi untuk

melindungi hak-hak dari masing-masing pihak jika terjadi hal-hal yang tidak dikemudian hari. Karena Perjanjian Pra Nikah bukanlah merupakan suatu sarana untuk mempermainkan tujuan suci dari perkawinan itu sendiri melainkan perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Proses Penerapan Perjanjian Pranikah

Kebenaran perjanjian pra-nikah di Indonesia sendiri dilindungi secara hukum, yakni pada Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.” Ini artinya hukum telah mengakui sah nya perjanjian pra-nikah yang melindungi antar pasangan suami dan istri. Berikut proses pembuatan Perjanjian sampai penerapannya:

1. Menulis keinginan masing-masing

Masing-masing pasangan bisa berdiskusi, kemudian selanjutnya menuangkan semua hal yang ingin diatur dalam perjanjian pra nikah. Perjanjian ini sifatnya bebas, namun terikat kontrak yang telah disahkan oleh notaris.

2. Membawa konsultan hukum

Jika pasangan calon suami isteri bingung dalam menuangkan poin-poin perjanjian, maka bisa mendatangi konsultan hukum guna meminta

pengarahan. Karena terkadang, pasangan yang baru berencana menikah butuh bantuan konselor untuk mendapatkan gambaran aturan demi aturan yang dituangkan dalam perjanjian pra nikah tersebut.

3. Bawa ke Notaris

Setelah pasangan Calon Suami-Isteri selesai menuliskan semua hal yang ingin dituangkan dalam perjanjian pra nikah, cukup membawanya langsung kepada notaris untuk segera disahkan. Untuk pembuatan perjanjian pra nikah tidak perlu datang ke pengadilan karena notaris sudah memiliki hukum yang kuat.

4. Masih dapat diubah meskipun telah dibawa kepada Notaris

Setelah dibawan kepada notaris, pihak yang memiliki kewenangan hukum akan menyusun poin per poin dan kalimat demi kalimat yang telah dituliskan sebelumnya dalam format perjanjian pra nikah dan masih bisa mengubahnya bila berubah pikiran sebelum disahkan menjadi akta.

5. Bawa Akta ke Lembaga Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA)

Langkah terakhir, bawalah perjanjian pra nikah tersebut ke Lembaga Catatan Sipil atau KUA setempat untuk segera didaftarkan. Pasalnya, perjanjian ini harus diserahkan sebelum prosesi ijab qabul. Oleh karena itu buatlah minimal dua bulan sebelum pernikahan diselenggarakan.

C. Implikasi Perjanjian Pranikah

Ada beberapa Dampak positif dari Perjanjian Pra Nikah ini bagi para pihak yang membuatnya, yaitu:

1. Semuanya tertata dengan jelas

Dengan perjanjian pranikah kehidupan rumah tangga itu semakin jelas sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh masing-masing pihak.

2. Harta dan utang

Masalah harta dan utang bisa menjadi masalah yang pelik ketika pasangan suami istri memutuskan berpisah, dengan surat ini jelas diatur bahwa harta dan utang suami menjadi milik dan tanggung jawab suami pun demikian yang terjadi pada sang istri.

3. Membuat usaha

Dengan perjanjian ini, pasangan suami istri mudah dan dapat secara profesional membuat suatu usaha baru. Ini terjadi karena kekayaan yang dihitung bukan atas nama satu orang, tetapi nama masing-masing.

Disamping memiliki dampak positif, Perjanjian Pra Nikah ini juga memiliki dampak negatif yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perkawinan. Dampak tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Egois

Sisi negatifnya, perjanjian ini bisa menjadi bumerang karena menunjukkan sisi egois baik dari suami maupun istri. Salah satu dari pasangan suami istri bisa lebih kuasa karena memiliki harta lebih banyak.

2. Pengaruh negatif

Hal negatif lainnya, selingkuh ataupun berfoya-foya sering terjadi karena tidak ada pengawasan terhadap harta yang dihasilkan setelah pasangan

suami istri menikah. Idealnya suami bisa jadi lebih peduli dengan harta yang ia punya begitu juga dengan sang istri.

3. Ketakutan berlebih

Perjanjian pranikah ini bisa menjadi gambaran bahwa ada rasa takut berlebih dari Anda maupun pasangan untuk menjalani hidup bersama. Perlu diingat kembali, bahwa jika Anda sudah memutuskan untuk menikah, berarti Anda siap menerima pasangan Anda seutuhnya dan sudah mengenal karakter pasangan Anda.

Peraturan Pelaksanaan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang Perjanjian Perkawinan. Dalam pasal 12 h dikatakan “Perjanjian Perkawinan apabila ada”. Jadi bila ada Perjanjian Perkawinan maka harus dimuat dalam Akta Perkawinan dan sebaliknya. Maka apabila ada suatu perjanjian, tapi tidak dimuat dalam Akta maka akta itu tidak sempurna.

Selain hal-hal diatas masih ada lagi manfaat dari Perjanjian Pra Nikah itu sendiri, antara lain ialah:

1. Untuk melindungi harta kekayaan dari masing-masing pihak (calon suami/istri). Hal ini membuktikan bahwa pasangan calon suami-istri akan menikah dengan anda bukan dengan harta benda yang dimiliki.-Untuk melindungi kepentingan dari para pihak. Yang artinya jika pihak suami melakukan poligami (bagi yang beragama Islam), maka akan ada pengaturan mengenai kehidupan semua istri dan harta masing-masing perkawinan terpisah.

2. Menjamin para pihak (suami/istri) dalam hal hutang dari masing-masing pihak.
3. Menjamin berlangsungnya harta
4. Menjamin kondisi finansial setelah perkawinan putus atau berakhir. Hal ini cenderung bermanfaat bagi perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan.

Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam pembuatan suatu perjanjian, yaitu tentang hal tercapainya suatu tujuan (apabila kedua belah pihak memenuhi kewajiban dan hak timbal balik secara penuh), tidak tercapainya tujuan (apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya), dan terjadi keadaan yang bukan tujuan (apabila kerugian akibat perbuatan melawan hukum).³⁰

Dalam membuat perjanjian kawin maka selanjutnya maka perlu diperhatikan bahwa tidak lama sesudah itu perkawinan sudah harus dilangsungkan. Sebab bilamana salah seorang yang diperlukan izinya untuk perkawinan itu meninggal terlebih dahulu maka haruslah perjanjian kawin yang telah dibuat itu diganti dan harus dibuat yang baru dengan *bijstand* dari orang yang isinya diperlukan pada saat itu.

Ada beberapa akibat dari perkawinan yang putus karena adanya suatu perceraian, yaitu akibat terhadap anak dan istri, terhadap harta perkawinan dan juga terhadap status. Ketiga hal tersebut dapat kita bahas sebagai berikut :

1. Akibat terhadap anak

Ada tiga hal yang perlu dipatuhi sebagai akibat perkawinan putus karena suatu perceraian, yaitu :

- a. Pertama, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak.
 - b. Kedua, bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.
 - c. Ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.
2. Akibat terhadap harta perkawinan
- Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatuhan.
3. Akibat terhadap status
- Akibat ini berdampak bagi kedua belah pihak jika terjadi perceraian, antara lain yaitu, kedua mereka tidak lagi terikat dalam suatu ikatan perkawinan, kedua mereka bebas untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang atau agama mereka.³²

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PERJANJIAN PRANIKAH

A. *Perjanjian Pranikah Perspektif Mazhab Hanafi*

1. Latar Belakang Madzhab Hanafiyah

Pendiri mazhab Hanafi ialah Nu'man bin Tsabit bin Zautha. Dilahirkan pada masa sahabat, yaitu pada tahun 80 H./699 M. Beliau wafat pada tahun 150 H. bertepatan dengan lahirnya Imam Syafii Radhiyallahu anhu. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah an-Nu'man. Madzhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau, serta pendapat-pendapat pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka, yang kesemuanya adalah hasil dari cara metode ijtihad ulama-ulama Irak. Karena itu mereka juga disebut madzhab Ahlu Ra'yi. Penganut Madzhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah. Kemudian terbesar ke negara-negara Islam bagian Timur. Sekarang ini Madzhab Hanafi merupakan madzhab resmi di Mesir, Turki, Syiriah dan Libanon. Madzhab ini dianut sebagian besar penduduk Afghanistan, Pakistan, Turkistan, India, Cina, dan sekitar 25.000 pengikut di Amerika Selatan.

Madzhab Hanafi merupakan madzhab terbesar dengan 30% pengikut dari seluruh umat Islam dunia.⁴⁸ Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan "al-Imam al-A'zham" () yang berarti imam terbesar. Ia juga dikenal sangat rajin belajar, taat ibadah dan sungguh-sungguh dalam

⁴⁸ <https://www.Facebook.com/PecintaRasulullahDanUlama/Posts/4163648355094200>. (02-11-2016).

mengerjakan kewajiban agama. Kata hanif (حنيف) dalam bahasa Arab berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadist, nahwu, sastra, syi'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminati adalah ilmu teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut.⁴⁹ Dalam usia yang relatif muda, laki-laki yang berasal dari keturunan Persia ini telah menyelesaikan pelajaran membaca Al-Qur'an. Setelah itu disamping belajar bahasa arab, waktunya lebih banyak digunakan sebagai pedagang pakaian jadi. Ia memiliki sebuah toko warisan peninggalan ayahnya, yang juga seorang saudagar kota kufah.⁵⁰ Imam Abu Hanifah seorang yang berjiwa besar dalam arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia adalah seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan tepat dalam memberikan suatu keputusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi.

Karena ia seorang yang berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur, ia dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah, ia mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu, sehingga beliau telah berhasil menyandang jabatan atau gelar yang tinggi yaitu, imam besar (Al-Adham) atau ketua agung.

Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang ahli dalam ilmu fiqh di negara Irak, dan beliau juga sebagai ketua kelompok ahli pikir (ahlu-Ra'yi). Ia dapat penghargaan dimasa itu. Seorang utusan yang di antar oleh Abdullah bin Al-

⁴⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 95-96.

⁵⁰ Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 12.

Mubaraq (seorang pejabat ketika itu) berkata: “Imam Abu Hanifah adalah akal ilmu pengetahuan”, dan perutusan lain pun berkata iasebagaai pakar dalam ilmu fiqh.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di kufah yang padawaktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas‘ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha‘i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy‘ari (wafat 120 H). Hammad Ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuriah; keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di kufah dari golongan Tabi‘in. Dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits.⁵¹

Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, Majlis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Setelah itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwafatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan muridnya itu menjabat hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, Utsmani dan Muqhal. Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu

⁵¹ Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 12.

memberi nasehat kepadanya, antara lain adalah: Imam Amir ibn Syahril al-Sya'by dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy'ary. Ia mempelajari qira'at dan tajwid dari Idris Ashim. Beliau sangat rajin dan selalu taat serta patuh pada perintah gurunya.⁵² Abu hanifah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umayyah dan pemerintahan Abbasiyyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Mawardi dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansur.⁵³

2. Rukun Perkawinan Mazhab Hanafi

Rukun artinya bagian dari hakikat sesuatu, dimana sesuatu tersebut tidak akan ada kecuali bagian tadi ada. Dengan kata lain, tidak dianggap nikah manakala tidak terpenuhi rukun pernikahan. Seperti akad nikah yang merupakan bagian dari rukun nikah. Pernikahan tidak dianggap, manakala tidak ada akad.⁵⁴ Menurut Imam Hanafi, rukun adalah keberadaan sesuatu, yang bergantung kepada sesuatu yang lain, dan sesuatu tersebut merupakan bagian dari hakikat secara keseluruhan. Menurut jumhur ulama, rukun adalah sesuatu yang menjadi sandaran terhadap keberadaan hakikat, dan hakikat sesuatu tidak ada kecuali terpenuhi sesuatu tersebut.⁵⁵

⁵² Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 96-97.

⁵³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Imam Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991). h. 13.

⁵⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufashshal fî Ahkâmi al-Mar'ati wa Baiti al-Muslimi fî al-Syar'iati al-Islâmiyyati*, Muassasah al-Risâlah, cet. III, vol VI, Beirut, h. 80.

⁵⁵ Wabbah al-Zuhaili, *Al-Fikihu al-Islmiy wa Adillatuhu*, Dâr al-Fikri, vol IX, cet. IV, Beirut, h. 6521.

Dalam kitab fikih bermazhab Hanafi, “Syarh Munthaha al-Irâdath” diterangkan bahwa rukun nikah adalah ijab kabul saja.

Pengertian dari perkawinan Ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.

3. Syarat Perkawinan Mazhab Hanafi

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁵⁶

Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama;Cet. 5, (Kencana Premedia Group, 2006), h. 59.

bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat focus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama hanfiah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama hanfiah membagi syarat itu kepada:

1. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya sesuatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syurut al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.

3. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nyaperkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
4. *Syurut al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsungitu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekufu dengan istrinya.⁵⁷

Persyaratan yang diajukan berupa perjanjian apakah dapat mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan? Atau bagaimana hukum dari persyaratan tersebut dalam suatu akad pernikahan?

Menurut Mazhab Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Kamil Musa bahwa persyaratan yang diajukanoleh calon istri tidak wajib dilakukan oleh suami, dan tidak akan mempengaruhi akad nikah itu, baik dari segi ketidakabsahan maupun kelangsungan akad tersebut. Akad nikah tersebut tetap berlaku, jika suamidapat melakukan persyaratan tersebut, hal ini tidak menjadi problem.Namun, jika suami ternyata tidak menepatinya, maka suami harus berusaha membayar *mahar* yang telah diucapkannya. Misalnya, suami mengungkapkan untuk membayar *mahar*

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama;Cet. 5, (Kencana Premedia Group, 2006), h. 60.

tertentu disertai syarat yang menguntungkan istrinya, misalnya suami tidak akan keluar dari desanya, tidak akan menikah lagi, atau tidak akan menceraikannya. Apabila suami dapat memenuhi persyaratan tersebut, itu semua dianggap sebagai *mahar*. Akan tetapi, jika tidak dapat melaksanakan persyaratan tersebut, sebaiknya suami memilih *mahar* yang lain.⁵⁸

Menurut Syafi'i, persyaratan harus logis dan dapat dipenuhi dan tidak melenceng dari tujuan pernikahan. Seperti jika istri mengajukan persyaratan kepada suaminya untuk tidak memindahkannya dari tempat tinggalnya maka persyaratan ini batal, namun akad nikahnya tetap berlaku. Akan tetapi, jika perjanjian tersebut bertentangan dengan keharusan dalam akad nikah seperti suami tidak akan mendapat bagian rumah sebagaimana yang didapat dari calon istri, maka perjanjian tersebut batal dan akad nikahnya pun batal.⁵⁹

B. Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Positif

1. Perjanjian Pranikah perspektif Pasal 29 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁶⁰ Menurut penjelasan

⁵⁸Kamil Musa, *Suami-istri Islam*, Cet. Ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.45-46, dikutip Dalam Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita", *Jurnal* (Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2008).

⁵⁹Kamil Musa, *Suami-istri Islam*, h. 46-47, dikutip Dalam Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita", *Jurnal*.

⁶⁰R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang- Undangan Perkawinan di Indonesia*, (AirLangga University Press, 1988), h. 57.

pasal 29 Undang-Undang perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Taklik talak tidak termasuk ke dalam pengertian perjanjian kawin. Taklik talak adalah syarat- syarat atau janji-janji yang disepakati bersama dan menjadi keinginan pihak-pihak yang akan menikah yang diucapkan dalam ijab Kabul dan dihadapan saksi-saksi dalam akad nikah.⁶¹

Di dalam Undang-Undang perkawinan hanya terdapat satu pasal mengatur mengenai perjanjian kawin, yaitu Pasal 29. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang- Undang perkawinan sama sekali tidak mengatur mengenai perjanjian kawin. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya, termasuk KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*, kitab Undang- Undang Hukum Perdata) tetap berlaku.⁶²

Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, KUHPerdara menganut sistem kesatuan harta suami istri. Apabila suami istri ingin membatasi atau menutup kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan, maka dibuatlah perjanjian kawin.⁶³ Adapun tujuan dari dibuatnya perjanjian kawin adalah:

1. Apabila harta kekayaan salah satu pihak (suami atau istri) lebih besar dibanding harta kekayaan pihak lainnya.

⁶¹T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam* h. 112.

⁶²T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam* h. 112.

⁶³T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam* h. 58.

2. Kedua pihak (suami dan istri) membawa masuk harta yang cukup besar ke dalam harta perkawinan.
3. Masing-masing memiliki usaha sendiri. Sehingga apabila salah satu jatuh bangkrut (pailit), maka yang lain tidak ikut pailit.
4. Terhadap utang-utang yang dibuat sebelum perkawinan, masing-masing akan menanggung utangnya sendiri.

Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan demikian bentuk perjanjian kawin adalah bebas, bisa dalam bentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan. Namun dalam praktik perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta otentik dihadapan notaris.⁶⁴

Selanjutnya perjanjian kawin disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengesahan hanya diberikan apabila perjanjian kawin tidak melanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan. Pasal 29 ayat 3 Undang-undang perkawinan menentukan bahwa perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Sehingga tertutup peluang bagi para pihak untuk memberlakukan perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung atau beberapa saat setelah perkawinan berlangsung. Apabila perkawinan tidak jadi dilangsungkan, maka perjanjian kawin menjadi gugur.

⁶⁴T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam* h. 60.

Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Seperti dalam Pasal 29 ayat 3 yang berbunyi:

“Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”.⁶⁵

Tidak adanya ketentuan lain mengenai saat berlakunya perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, harus diartikan bahwa Undang-undang tersebut tidak menghendaki dipilihnya saat lain daripada yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tersebut. Perjanjian perkawinan ini berlaku baik bagi suami-isteri yang bersangkutan maupun terhadap pihak ketiga.⁶⁶

Pasal 29 ayat 4 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak dapat diubah, kecuali atas perjanjian (persetujuan) dari suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga. Ketentuan ini dipandang kurang lengkap karena tidak mengatur mengenai tata cara melakukan perubahan perjanjian kawin. Di belanda perubahan perjanjian kawin dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan dan diumumkan melalui minimum dua surat kabar yang dulu mengumumkan perjanjian kawin yang ingin diubah tersebut.⁶⁷

Pasal 29 ayat 4 dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya perjanjian perkawinan tersebut bersifat tetap sepanjang perkawinan. Atas asas tersebut dimungkinkan adanya penyimpangan, tetapi dengan dibatasi dengan syarat-syarat:

⁶⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 29.

⁶⁶Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 229.

⁶⁷T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam* h. 61.

1. Atas persetujuan dari kedua belah pihak.

Kata persetujuan menegaskan bahwa perubahan perjanjian kawin tidak boleh terjadi karena paksaan. Harus ada keikhlasan dari kedua belah pihak. Mengingat perubahan atas suatu perjanjian perkawinan seperti untuk setiap perjanjian yang lain harus dilakukan pula dengan membuat suatu perjanjian yang baru, sedang salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya sepakat yang bebas. Yang lebih penting adalah syarat “kedua belah pihak”. Maksud dari kedua belah pihak disini adalah suami dan isteri. Selain itu dalam perubahan perjanjian perkawinan, orang tua dan bekas wali tidak perlu turut campur lagi, mengingat orang-orang yang dalam status menikah termasuk juga yang pernah menikah adalah orang-orang yang cakap untuk bertindak dalam hukum.

2. Tidak merugikan pihak ketiga

Mengapa disebutkan secara jelas mengenai pihak ketiga? Karena memang pihak ketiga seperti kreditur khususnya adalah orang yang berkepentingan dengan keadaan harta perkawinan suatu keluarga. Jaminan atas piutang-piutangnya sedikit banyak bergantung dari keadaan dan bentuk harta perkawinan debiturnya. Sehingga dalam hal ini pihak ketiga sangat berkepentingan.⁶⁸

Pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi memperluas makna dari Pasal 29 ayat (1), (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶⁸ Farida Dwi Irianingrum, Studi Tantang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya, *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2008), h. LIV.

sesuai dengan perohonan uji materi yang dimohonkan oleh pelaku kawin campur, Ike Farida.

Mahkamah dalam putusannya bernomor 69/PUU-XIII/2015 ini memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait perjanjian perkawinan. Mahkamah memperluas makna perjanjian perkawinan yang pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan.⁶⁹

Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 ayat (1) UUP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.⁷⁰

Pasal 29 ayat (3) UUP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.”⁷¹

Sedangkan, Pasal 29 ayat (4) UUP inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut,

⁶⁹ MK ‘Perlonggar’ Makna Perjanjian Perkawinan, *Situs Resmi Hukumonline*. <http://www.hukumonline.com> (20 April 2017).

⁷⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷¹ Putusan Mahkamah Agung No. 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 ayat (3).

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”⁷²

Menurut Mahkamah, Pasal 29 UU Perkawinan hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan. Padahal, faktanya ada fenomena suami istri karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dengan akta notaris. Menurut Mahkamah, frasa “*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*” pada Pasal 29 ayat (1), frasa “*...sejak perkawinan dilangsungkan*” pada Pasal 29 ayat (3), dan frasa “*selama perkawinan berlangsung*” pada Pasal 29 ayat (4) UUP membatasi kebebasan dua orang individu kapan akan membuat ‘perjanjian’. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, frasa “*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*” dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa “*selama perkawinan berlangsung*” dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan,” ujar Hakim Konstitusi Wahidudin Adams saat membacakan pertimbangan putusan.⁷³

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung tentang uji materi Pasal (29 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka

⁷² Putusan Mahkamah Agung No. 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 ayat (4).

⁷³ MK ‘Perlonggar’ Makna Perjanjian Perkawinan, *Situs Resmi Hukumonline*. <http://www.hukumonline.com> (20 April 2017).

perjanjian perkawinan tidak hanya dibuat pada saat sebelum perkawinan, namun dapat juga dibuat setelah perkawinan.

Perjanjian Perkawinan/Perjanjian Pra Nikah merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat yang sudah diatur oleh hukum/ Undang-Undang yang berlaku. Dampak yuridis dari Perjanjian Perkawinan/ Perjanjian Pra Nikah ialah meliputi:

1. Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri,
2. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan,
3. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.⁷⁴

Perjanjian Perkawinan yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan/nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak calon suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut. Jika Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian, hal ini seperti dinyatakan dalam pasal 51.

Kompilasi Hukum Islam yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
“Pelanggaran atas Perjanjian Perkawinan memberikan hak kepada istri untuk

⁷⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdataIndonesia*, cet.III, Bandung, (Penerbit: PT.Citra Aditya Bakti), h.99.

meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.⁷⁵

Alasan dibuatnya suatu Perjanjian Pra Nikah ialah bukan untuk bercerai dikemudian hari tapi cenderung untuk melindungi para pihak (suami/istri) jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan. Ada beberapa Dampak positif dari Perjanjian Pra Nikah ini bagi para pihak yang membuatnya, yaitu :

1. Semuanya tertata dengan jelas

Dengan perjanjian pranikah kehidupan rumah tangga itu semakin jelas sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh masing-masing pihak.

2. Harta dan utang

Masalah harta dan utang bisa menjadi masalah yang pelik ketika pasangan suami istri memutuskan berpisah, dengan surat ini jelas diatur bahwa harta dan utang suami menjadi milik dan tanggung jawab suami pun demikian yang terjadi pada sang istri.

3. Membuat usaha

Dengan perjanjian ini, pasangan suami istri mudah dan dapat secara profesional membuat suatu usaha baru. Ini terjadi karena kekayaan yang dihitung bukan atas nama satu orang, tetapi nama masing-masing.

⁷⁵H. A Damanhuri H. R, *Segi-segi hukum Perjanjian Perkawinan harta bersama*, cet.ke.II (Palembang, Mei 2012, Penerbit: cv. Mandar Maju), h. 20-21, dikutip Dalam Filma Tamengkel, Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Skripsi* (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015), h. 7.

Di samping memiliki dampak positif, Perjanjian Pra Nikah ini juga memiliki dampak negatif yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perkawinan. Dampak tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut :

1. Egois

Sisi negatifnya, perjanjian ini bisa menjadi bumerang karena menunjukkan sisi egois baik dari suami maupun istri. Salah satu dari pasangan suami istri bisa lebih kuasa karena memiliki harta lebih banyak.

2. Pengaruh negatif

Hal negatif lainnya, selingkuh ataupun berfoya-foya sering terjadi karena tidak ada pengawasan terhadap harta yang dihasilkan setelah pasangan suami istri menikah. Idealnya suami bisa jadi lebih peduli dengan harta yang ia punya begitu juga dengan sang istri.

3. Ketakutan berlebih

Perjanjian pranikah ini bisa menjadi gambaran bahwa ada rasa takut berlebih dari Anda maupun pasangan untuk menjalani hidup bersama. Perlu diingat kembali, bahwa jika Anda sudah memutuskan untuk menikah, berarti Anda siap menerima pasangan Anda seutuhnya dan sudah mengenal karakter pasangan anda.⁷⁶

2. Perjanjian Pranikah Perspektif Pasal 139- 154 KUHPerdara

Perjanjian perkawinan telah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perjanjian perkawinan diperbolehkan

⁷⁶Filma Tamengkel, Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015), h. 8-9.

oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun perincian pengaturannya tidak lengkap seperti dalam *B.W.*

Berdasar Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berisi :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1993 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op degemengde Huwelijken* S. 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.⁷⁷

Pasal tersebut merupakan pasal peralihan yang mengatur bahwa peraturan di dalam *B.W.* dan peraturan-peraturan lainnya tentang perkawinan tidak dapat diberlakukan lagi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun terdapat beberapa hal yang tidak diatur secara mendetail di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga *B.W.* masih dapat digunakan sebagai pegangan untuk pelaksanaannya.

Dalam KUHPerdata terkandung asas-asas, bahwa kedua belah pihak adalah bebas dalam menentukan isi perjanjian kawin yang dibuatnya. Pasal 139 KUHPerdata menetapkan, bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua calon suami istri dapat menyimpang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan

⁷⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 66.

dengan kesusilaan dan ketertiban umum dengan mengindahkan isi ketentuan Pasal 139 KUHPerdara.⁷⁸

Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian kawinnya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak membuat janji-janji yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Perjanjian kawin tidak boleh mengurangi hak-hak karena kekuasaan suami, hak-hak karena kekuasaan orang tua, hak-hak suami istri yang hidup terlama.
3. Tidak dibuat janji-janji yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan.
4. Tidak dibuat janji-janji, bahwa salah satu pihak akan memikul utang lebih besar dari pada bagiannya dalam aktiva.
5. Tidak dibuat janji-janji, bahwa harta perkawinan akan diatur oleh undang-undang Negara asing.
6. Dalam perjanjian perkawinan, isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asalkan tidak menyalahi aturan hukum yang telah berlaku, agama, dan kesusilaan.
7. Isi perjanjian yang tidak melanggar barasan-batasan hukum, misalnya dalam perjanjian di tentukan istri tidak di di beri wewenang melakukan perbuatan hukum, hal ini melanggar batas-batas hukum karena hukum menentukan wanita yang bersuami berhak melakukan perbuatan hukum apapun.

⁷⁸ T.Triwulan Titik,*Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana prenada media grup, 2008), h.112.

8. Isi perjanjian tidak melanggar batasan-batasan agama, misalnya dalam perjanjian itu suami istri tetap boleh bergaul dengan laki-laki atau perempuan yang ada di luar. Ini jelas melanggar batas agama, sebab agama melarang dalam pergaulan bebas. Yang melanggar batas kesusilaan.⁷⁹
9. Mengenai perjanjian perkawinan yang berkenaan dengan harta kekayaan, terdapat perbedaan prinsip antara ketentuan yang di atur oleh KUHPer dan UUP. Dalam KUHPer di tentukan apabila tidak di tentukan perjanjian, sejak perkawinan di langsunikan terjadi penyatuan harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri.

Di dalam KUHPerdata (BW) tentang perjanjian kawin umumnya di tentukan dalam Pasal 139-154. Sedangkan menurut Pasal 29 Undang-Undang No 1 tahun 1974 di katakan bahwa:

”Pada waktu atau sebelum perkawinan di langsunikan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.⁸⁰

Perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 (2)), dan perjanjian berlaku sejak perkawinan itu di langsunikan (Pasal 29 (3))., dan tidak dapat di rubah, apabila ada perubahan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ke tiga.

⁷⁹Abdulkarim Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Pt Cipta Aditya Bakti, 2000), h. 88-89.

⁸⁰Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 29 ayat (1).

1. Perjanjian dalam hukum adat

Perjanjian dilakukan sebelum waktu perkawinan berlaku di hukum adat yang disaksikan oleh pihak keluarga dan ketua adat. Sebagian besar perjanjian ini tidak dibuat secara tertulis tetapi diumumkan di para anggota keluarga, tamu undangan yang hadir di pernikahan. Semisal seperti perjanjian tentang status suami dan istri apakah dalam perkawinannya ini dalam bentuk perkawinan jujur atau kawin semenda.⁸¹

2. Perkawinan dalam hukum agama

Hukum Islam tidak menegaskan tentang rinci mengenai perjanjian perkawinan sebagai syarat dalam pernikahan. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali perjanjian itu sebagai berikut:

- a. Kewajiban suami terhadap istri, seperti membelikan pakaian, tempat tinggal, dan nafkah. Perjanjian seperti ini disepakati oleh para ulama, dan wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri.
- b. Istri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangga, tidak boleh dibawa merantau, dan tidak boleh diadu, menurut Hambali ini harus dipenuhi, tetapi Syafi'i menampik argumen tersebut dan tidak mewajibkan.

⁸¹ Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.58.

- c. Suami harus menceraikan istri terlebih dahulu yang ada untuk melangsungkan pernikahan yang berikutnya, para ulama tidak mewajibkan karena ada larangan dari Rasulullah.

3. Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Islam

Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum kemerdekaan RI atau sesudahnya. Hukum agama yang dimaksud di sini adalah *fiqh munaqahat*, yang kalau dilihat dari materinya berasal dari mazhab Syafi'iy karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan mazhab Syafi'iy dalam keseluruhan amaliah agama.

Fiqh munaqahat dalam pandangan mazhab Syafi'iyah sudah banyak ditemukan pendapat yang berbeda dikalangan ulama Syafi'iyah sendiri. Apalagi kalau diperluas keluar mazhab Syafi'iy, kemungkinan dalam seluruh materinya terdapat pandangan ulama yang berbeda. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih dimungkinkan, namun memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Perjanjian atau perikatan secara etimologi adalah ikatan, sedangkan menurut terminology perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan menurut Hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* () yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”

جمع طرفي حبلين و يشد احدهما بالآخر حتى يتصلا فيصبا كقطعة واحدة

Artinya:

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.”

Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain dan kemudian karenanya timbul ketentuan atau kepastian pada dua sisinya.

ارتبط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت الترضى

Artinya:

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhan kedua belah pihak.”

Menurut Abdul Aziz Muhammad kata aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna aqad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga dengan janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya”.

Dengan demikian definisi baik dari kalangan ahli hukum perdata dan ahli hukum islam ada persamaan dimana titik temunya adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan seorang lainnya.

Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang

merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim.

Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad (perjanjian) dapat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masih banyak terdapat kekuarangan, selain pengaturan perjanjian kawin dalam Undang- Undang Perkawinan tidak selengkap KUH Perdata terdapat juga kekurangan lain, khususnya pasal yang mengatur tentang Perjanjian kawin. Itu tampak dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada ayat 4 dikatakan bahwa “perjanjian tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan dari para pihak”. Hal ini bisa membuat keluasan bagi para pihak bisa seenaknya dalam membuat perjanjian, karena jika diubah pada saat perkawinan sudah dilangsungkan maka bukan Perjanjian Pra Nikah lagi namanya dan hal tersebut bisa berpengaruh terhadap anak. Dan hal lain juga bahwa Undang- Undang Perkawinan masih menghidupkan dualisme hukum.
2. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan modern telah mempengaruhi cara berpikir manusia menjadi kritis sehingga perkawinan yang sakral dan suci dapat ternoda dengan adanya suatu perjanjian perkawinan.⁸² Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai,

⁸² maksudnya makna dari perkawinan itu sendiri telah dikesampingkan, dimana perkawinan itu untuk menyatukan, namun dengan adanya perjanjian perkawinan telah ada niat untuk tidak menyatukan terutama masalah harta, walaupun perjanjian perkawinan itu sendiri di perbolehkan dan tidak ada peraturan manapun yang melarang tentang perjanjian perkawinan.

perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

3. Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat focus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

B. Implikasi Penelitian

1. Pemerintah dalam hal ini ialah kiranya dapat memperhatikan perihal tentang pengaturan Perjanjian Perkawinan karena masih terdapat cela yang bisa merugikan para pihak. Dan juga pemerintah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya Perjanjian Pra Nikah.
2. Perlu adanya kesadaran masyarakat agar tidak memandang negatif mengenai Perjanjian Pra Nikah tersebut melainkan kiranya masyarakat dapat memahami secara jelas tentang pentingnya Perjanjian Pra Nikah pada pernikahan untuk melindungi para pihak yang berkepentingan dalam perkawinan.

3. Undang- undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-Undang perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, Andi Intan. *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Departemen Agama R.I. *Al-Quran terjemahnya*. Jakarta: C.V Toha Putra, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- H.R, H.A Damanhuri. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Cet. XI; Palembang: CV. Mandar Maju, 2012.
- Istiqamah. *Hukum Perdata di Indonesia*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero).
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban-kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.
- Saleh, K Wantjik. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. VII; Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Supardin. *Materi Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. V; Kencana Premedia Group, 2006.
- Titik, T. Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.